

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan pikir Fraksi PKB DPRD Kabupaten Magelang melibatkan beberapa tahapan utama dan masih menghadapi sejumlah hambatan dalam pelaksanaanya. Tahapan tersebut menunjukkan bagaimana mekanisme Fraksi PKB dalam menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan, sedangkan hambatan yang muncul menggambarkan tantangan yang membutuhkan perbaikan agar proses penyusunan pikir dapat berjalan lebih optimal. Adapun kesimpulan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tahapan penyusunan pokok-pokok pikiran (pikir) DPRD Fraksi PKB Kabupaten Magelang

Penyusunan pikir DPRD Fraksi PKB Kabupaten Magelang dilaksanakan melalui tahapan berikut ini :

a. Penyerapan aspirasi

Dalam tahapan penyerapan aspirasi dilakukan melalui 2 saluran yaitu saluran formal berupa kegiatan reses dan juga melalui saluran informal melalui interaksi langsung antara masyarakat dengan anggota dewan. Berdasarkan hasil penelitian aspirasi yang diserap oleh DPRD Fraksi PKB dominan bersumber dari kelompok keagamaan, dimana hal tersebut disebabkan karena anggota DPRD Fraksi PKB lebih

mengutamakan konstituennya yang banyak berasal dari kelompok keagamaan khususnya dari kalangan Nahdlatul ulama.

b. Seleksi Aspirasi

Tahapan berikutnya adalah seleksi aspirasi, dimana dalam menyeleksi aspirasi setiap usulan yang akan dimasukkan ke dalam pokir wajib diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam sapta cipta 1,3,4, dan 6 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Magelang. Dengan demikian arah penyusunan Pokir DPRD Kabupaten Magelang tahun 2025 masih berfokus pada tiga bidang pembangunan, yaitu sektor pendidikan dan keagamaan (sapta cipta 1), pemberdayaan masyarakat dan kebudayaan (sapta cipta 6), serta pembangunan ekonomi dan infrastruktur (sapta cipta 3 dan 4).

c. Pembahasan Internal Fraksi

Tahapan selanjutnya yaitu pembahasan internal fraksi. Dalam tahapan ini dilakukan melalui forum Koordinasi daerah pemilihan (Kordapil) yang beranggotakan anggota Fraksi PKB dalam dapil yang sama dan pengurus PAC. Selain itu pada awal penyusunan pokir juga dilaksanakan rapat fraksi untuk membahas persiapan penyusunan pokir.

d. Penyusunan teknis dan input ke SIPD

Tahapan berikutnya yaitu penyusunan teknis dan input ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Dalam tahapan ini tenaga ahli fraksi bertugas untuk mengumpulkan, merekap, dan menginput pokir anggota DPRD ke SIPD.

e. Tahap verifikasi

Kemudian tahapan selanjutnya adalah verifikasi Pokir. Pokir yang sudah dimasukkan ke SIPD akan di verifikasi kembali oleh Bappeda dan OPD terkait untuk di cek kelengkapannya dan kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah.

f. Realisasi Pokir

Tahapan yang terakhir yaitu realisasi pokir. Untuk tahun 2025 ini penyusunan pokir baru sampai pada tahapan penetapan KUA-PPAS, jika Pokir sudah tercantum di KUA PPAS maka pokir dapat berpeluang besar terealisasi di APBD. Berdasarkan hasil penelitian, Pokir Fraksi PKB tahun 2025 yang tercantum di dalam KUA-PPAS mencapai 82%, tetapi sebagian besar anggota DPRD fraksi PKB merasa belum puas karena tahun-tahun sebelumnya hampir seluruh pokir terealisasi sepenuhnya. Kedudukan PKB sebagai oposisi di Kabupaten Magelang juga turut mempengaruhi proses realisasi pokir pada tahun 2025 ini.

2. Hambatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran

Dalam pelaksanaan penyusunan pokir DPRD Fraksi PKB Kabupaten Magelang ditemukan beberapa hambatan, antara lain sebagai berikut :

a. Hambatan administratif

Hambatan administratif tersebut berupa kurangnya kelengkapan berkas usulan pokir, yang mengakibatkan proses penyusunan menjadi lambat dan pokir berpotensi tidak terealisasi.

b. Hambatan teknis

Hambatan teknis meliputi keterbatasan kemampuan anggota DPRD dalam menggunakan sistem SIPD, sistem aplikasi SIPD yang sering eror, serta kurangnya koordinasi umpan balik dari pihak eksekutif terkait kesalahan atau kekurangan berkas.

c. Hambatan Politis

Hambatan secara politis muncul disebabkan karena adanya perubahan kepemimpinan daerah yang menempatkan Fraksi PKB sebagai oposisi, sehingga komunikasi politik antara legislatif khususnya Fraksi PKB dengan eksekutif menjadi melemah dan berdampak pada tingkat realisasi pokir yang menurun.

Dengan demikian penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Fraksi PKB Kabupaten Magelang telah berjalan dengan cukup baik dan mengikuti mekanisme yang berlaku, mulai dari penyerapan aspirasi hingga tahap verifikasi dan penetapan di KUA-PPAS. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan baik dari segi administratif, teknis, maupun politis.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Daerah

1. Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan DPRD, khususnya dalam proses verifikasi dan realisasi pokir.

2. Memperbaiki sistem SIPD agar tidak terjadi gangguan teknis yang menghambat input data.
3. Meningkatkan transparansi dalam verifikasi dan realisasi pokir agar tidak menimbulkan ketimpangan antarfraksi.

b. Bagi Fraksi PKB DPRD Kabupaten Magelang

1. Memperluas jaringan aspirasi ke kelompok masyarakat lain, sehingga tidak berfokus ke kelompok keagamaan saja.
2. Meningkatkan kemampuan digital anggota dewan agar dapat menggunakan sistem digital seperti SIPD secara mandiri.
3. Memperkuat komunikasi politik dengan pihak eksekutif agar proses realisasi pokir lebih optimal.

c. Bagi peneliti selanjutnya

1. Melakukan perbandingan antarfraksi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai proses penyusunan Pokir di Kabupaten Magelang.
2. Menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed method untuk mendapatkan analisis secara mendalam mengenai pengaruh politik terhadap realisasi pokir.
3. Mengkaji lebih dalam mengenai peran partai politik dan hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan daerah.